BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kondisi kesehatan masyarakat di Indonesia saat ini masih dihadapkan pada tantangan besar, terutama terkait rendahnya kesadaran dan perhatian terhadap isu kesehatan reproduksi. Dalam realitas sosial, aspek krusial ini kerap kali luput dari prioritas atau dikesampingkan begitu saja dalam rangkaian persiapan menuju jenjang pernikahan. Padahal, pelaksanaan pemeriksaan medis secara komprehensif sebelum melangsungkan perkawinan (*skrining* pranikah) memegang peranan yang sangat vital. Prosedur medis ini tidak hanya berfungsi sebagai fondasi untuk menjaga keharmonisan dan stabilitas kehidupan rumah tangga, tetapi juga instrumen strategis untuk mendeteksi secara dini potensi penyakit menular, kelainan genetik, maupun gangguan kesehatan lainnya pada diri calon mempelai.[1]

Kurangnya perhatian masyarakat terhadap kesehatan reproduksi menjadi salah satu faktor utama rendahnya partisipasi dalam Program Keluarga Berencana (KB), yang pada akhirnya berdampak pada tingginya angka kelahiran dan potensi terjadinya ledakan penduduk. Rendahnya pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi menyebabkan pasangan usia subur kurang memahami pentingnya perencanaan kehamilan dan pengaturan jarak kelahiran. Hal ini sejalan dengan penelitian Desy Tri Astuti, yang menyatakan bahwa “salah satu bekal yang harus

[1] Winny Kirana Hasanah dkk, *Analisis Pelaksanaan Edukasi Pranikah Terkait Kesehatan Reproduksi Pada Pasangan Calon Pengantin Muslim* (Narrative Literature Review)” 10, no. 2 (2022): 60.

dimiliki oleh calon pengantin yaitu pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi dan seksual".[2] Karena pemahaman yang rendah berpengaruh terhadap ketidaksiapan membangun keluarga yang terencana.

Kurangnya pemahaman serta pengetahuan dan akses terhadap informasi kesehatan reproduksi sebelum menikah, terutama pada remaja dan calon pasangan usia muda. Padahal, dari sudut pandang kesehatan masyarakat, kesiapan reproduksi sangat menentukan kualitas kesehatan ibu, anak, dan keluarga. Hal ini sejalan dengan penelitian Neneng Agustiningsih dan Muammar Qadafi yang menyatakan bahwa keterbatasan informasi kesehatan reproduksi menyebabkan calon pasangan menikah tidak memahami risiko kesehatan fisik dan psikologis yang dapat muncul akibat pernikahan dini atau ketidaksiapan reproduksi.[3]

Berdasarkan berbagai penelitian terkini, masih ditemukan rendahnya perhatian calon pengantin terhadap aspek kesehatan reproduksi, khususnya pemeriksaan medis sebelum menikah, konseling pranikah, serta informasi persiapan kehamilan dan kelahiran. Hal ini sejalan dengan penelitan Fitri, Hakimi, dan Sulistyaningsih yang menyatakan bahwa pemahaman calon pengantin mengenai kesehatan reproduksi dan manfaat pemeriksaan serta konseling pranikah masih terbatas, sehingga pemanfaatan layanan premarital care rendah dan

---

[2] Desy Tri Astuti, Rizkiana Putri, dan Shinta Mona Lisca, *Pengaruh Penyuluhan, Pemeriksaan Kesehatan Reproduksi, Dan Pemberian Tablet Tambah Darah Terhadap Tingkat Pengetahuan Dan Kesadaran Kesehatan Reproduksi Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Stunting Di Kecamatan Cinere Tahun 2022, SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 4 (2023): 1163.

[3] Muammar Qadafi dan Neneng Agustiningsih, *Pendidikan Kesehatan Reproduksi Untuk Mencegah Merariq Kodeq (Pernikahan Dini) Di Ma Al-Islahuddiny, Jurnal PkM (Pengabdian Kepada Masyarakat)* 4, no. 3 (2021): 222–32.

berpotensi meningkatkan risiko komplikasi kehamilan, infeksi menular seksual, serta masalah kesehatan ibu dan anak di masa depan.[4] Hal ini sejalan dengan penelitian Mulyaningsih yang menyatakan bahwa meskipun *premarital* dan *preconception care* merupakan komponen penting dalam meningkatkan kesehatan maternal dan neonatal, akses dan kesadaran masyarakat terhadap layanan tersebut masih rendah akibat kurangnya edukasi.[5] Hal ini sejalan dengan penelitian Sari, Purba, dan Sinaga yang menyatakan bahwa sebagian besar pasangan hanya memaknai pemeriksaan pranikah sebagai pemeriksaan fisik semata, tanpa memahami pentingnya kesiapan psikososial, perencanaan kehamilan, dan peran orang tua yang berpengaruh langsung terhadap tumbuh kembang anak.[6] Penelitian dari Ninsah Mandala Putri juga menegaskan bahwa konseling pranikah berperan penting dalam menyiapkan individu menuju kehamilan yang sehat, meskipun kualitas dan implementasinya masih perlu ditingkatkan.[7] Dan Mayunita juga menekankan pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi dan psikologi kesehatan dalam menekan perilaku berisiko serta mencegah kehamilan yang tidak

---

[4] Fitri, Mohammad Hakimi, dan Sulistyaningsih, *Prospective Brides' Experiences of Reproductive Health and Premarital Care: A Scoping Review,* 2025, 45–46.

[5] Erika Agung Mulyaningsih, Novi Anggraeni, dan Amirul Amalia, *Optimizing Pregnancy Outcomes: The Importance of Pre-Marital and Preconception Care, Salus Publica: Journal of Community Service* 2, no. 2 (2024): 112–113.

[6] Siti Nurul dkk, *International Journal of Health Science (IJHS) A Qualitative Study on the Implementation of Preconception Care in Preparation for Parenthood for Prospective Married Couples at Tanjung Tiram Community Health Center*, 2025, 78–79.

[7] Ninsah Mandala Putri Br Sembiring, Emma dosriamaya Simanjuntak, dan Desy Ratna sari Sembiring, *Pelaksanaan Konseling Kesehatan Pra Nikah Terhadap Persiapan Kehamilan Yang Sehat Pada Remaja Di Desa Namorih Kecamatan Pancurbatu Tahun 2024, SEWAGATI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia* 3, no. 2 (2024): 34–35.

direncanakan, sehingga dapat melindungi kesehatan ibu dan menjamin terpenuhinya hak serta tumbuh kembang anak secara optimal.[8]

Oleh karena itu, peningkatan edukasi dan penyuluhan kesehatan reproduksi menjadi langkah strategis dalam menekan berbagai risiko kesehatan reproduksi serta dampak sosial yang ditimbulkannya.Pentingnya bimbingan penyuluhan reproduksi ditegaskan karena masih rendahnya pengetahuan masyarakat yang dapat menimbulkan masalah serius.

Studi internasional menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana (KB) masih menghadapi masalah yang disebabkan oleh rendahnya kesiapan serta kualitas layanan kesehatan, walaupun akses terhadap kontrasepsi telah ada. Ada kesenjangan antara pemakaian kontrasepsi dan cakupan yang efektif, yang disebabkan oleh kurangnya tenaga terampil, terbatasnya metode kontrasepsi, serta kurangnya edukasi dan konseling tentang kesehatan reproduksi.[9] Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi program KB di tingkat desa memerlukan dukungan edukasi reproduksi yang berkelanjutan dan mudah dimengerti oleh masyarakat, untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi aktif pasangan yang berada di usia subur dalam mengikuti program KB.

Bimbingan penyuluhan reproduksi merupakan upaya yang sangat penting bagi masyarakat, khususnya pasangan usia subur yang menjalani program Keluarga Berencana (KB), karena berperan dalam meningkatkan pengetahuan dan

---

[8] Abela Mayunita dkk, H*ealth Psychology Science Education in Women's Pregnancy Outside Marriage, Jurnal Penelitian Pendidikan IPA* 11, no. 3 (2025): 59–60.

[9] Shenning Tian dkk, *Inequities in Effective Coverage of Family Planning Services in Low- and Middle-Income Countries: Linking Households and Facility Surveys, MedRxiv*, 2025, 1–2.

membentuk sikap positif terhadap penggunaan kontrasepsi. Penyuluhan yang diberikan secara terarah dapat membantu pasangan memahami berbagai pilihan metode kontrasepsi, mencegah terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan, menurunkan risiko masalah kesehatan ibu dan anak, serta mendorong perencanaan kehamilan yang sehat dan bertanggung jawab sehingga tujuan pembentukan keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkualitas dapat tercapai. Hal ini sejalan dengan penelitian Yunita dan Iswandari yang menyatakan bahwa konseling KB berpengaruh signifikan terhadap pemilihan metode kontrasepsi yang tepat.[10] Serta penelitian Meria Turnip, Nining Setiawati, dan Reni Aprinawaty Sirait yang menyatakan bahwa penyuluhan KB mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman perempuan usia reproduksi terhadap penggunaan kontrasepsi.[11] Selain itu, Agung Suharto dan Astin Nur Hanifah juga menyatakan bahwa konseling kesehatan reproduksi efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan sikap ibu terhadap kontrasepsi jangka panjang, yang berdampak pada pencegahan kehamilan tidak diinginkan.[12] Sementara Hasnita juga menegaskan bahwa edukasi kesehatan reproduksi dan kontrasepsi berkontribusi dalam pengaturan jarak kehamilan dan

[10] Laurensia Yunita dan Novita Dewi Iswandari, *Pengaruh Konseling Akseptor KB Terhadap Pemilihan Alat Kontrasepsi DiWilayah Kerja Puskesmas Pemurus Dalam, Midwifery And Complementary Care* 1, no. 2 (2022): 71–75.

[11] Meria Turnip, Nining Setiawati, dan Reni Aprinawaty Sirait, *The Influence Of Providing Kb Counseling On Knowledge Of Women Of Reproductive Age About 2-Month Kb Injection At PMB Nining Setiawan Indragiri Hulu District Year 2023*, *Jurnal Kebidanan Kestra (JKK)* 6, no. 1 (2023): 45–50.

[12] Agung Suharto dan Astin Nur Hanifah, *Effectiveness of Counseling in Increasing Mothers Behavior (Knowledge and Attitudes) Regarding Post-Placental IUD Selection to Realize the SDG Goals of Good Health and Well-Being* 12, no. 1 (2024): 44–50.

penurunan risiko masalah kesehatan ibu dan anak.[13] Temuan tersebut diperkuat oleh Christania yang menyatakan bahwa tingkat pengetahuan ibu tentang KB memiliki hubungan erat dengan pemilihan metode kontrasepsi, sehingga penyuluhan reproduksi menjadi faktor penting dalam keberhasilan program KB.[14]

Studi yang dilakukan oleh Yanmeer Simeone Tyotswam, Rosebella Alungata Iseme, dan Eliphas Gitonga Makunyi mengungkapkan bahwa bimbingan penyuluhan reproduksi yang terencana dan teratur secara signifikan meningkatkan pengetahuan, sikap positif, dan keterlibatan perempuan yang berada dalam usia produktif dalam penggunaan kontrasepsi. Dengan menggunakan desain percobaan terkontrol acak, kelompok yang menerima intervensi menunjukkan tingkat penggunaan kontrasepsi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok yang tidak menerima intervensi, yang menekankan bahwa pendidikan yang terstruktur dan terus-menerus adalah faktor penting dalam meningkatkan partisipasi dalam program Keluarga Berencana (KB).[15]

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu pilar strategis dalam pembangunan kesehatan masyarakat di Indonesia yang bertujuan untuk

---

[13] Hasnita, Firawati, dan Lili Purnama Sari, *Peningkatan Kesehatan Keluarga Melalui Edukasi Dan Implementasi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang Untuk Pengaturan Jarak Kehamilan, ABDIKAN: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sains Dan Teknologi* 4, no. 2 (2025): 67–74.

[14] Deasy Christania Embong Bulan, Nelfa Takahepis, dan Zainar Kasim, *Pengetahuan Ibu Tentang Metode KB Dengan Pemilihan Metode Kontrasepsi, Jurnal Riset Ilmu Kesehatan Umum Dan Farmasi (JRIKUF)* 3, no. 3 (2025): 38–48.

[15] Yanmeer Simeone Tyotswam, Rosebella Alungata Iseme, dan Eliphas Gitonga Makunyi, *A Randomized Controlled Study of the Effects of Targeted Health Education on Uptake of Contraceptives among Women of Reproductive Age in Nnewi City, South-East Nigeria, SAGE Open Medicine* 12 (2024): 1–5.

menekan laju pertumbuhan penduduk sekaligus membangun standar keluarga yang lebih berkualitas. Melalui inisiatif ini, pemerintah berupaya meminimalkan berbagai risiko kesehatan reproduksi, termasuk komplikasi saat persalinan serta kehamilan yang tidak direncanakan. Kendati studi mengenai pola penggunaan alat kontrasepsi pada pasangan usia subur sudah sering dilakukan, kajian ilmiah yang secara spesifik meneliti dampak jangka panjang dari penggunaan kontrasepsi tersebut terhadap kondisi kesehatan reproduksi wanita secara menyeluruh masih tergolong sangat terbatas.[16]

Upaya meningkatkan kesejahteraan sebuah keluarga dapat dicapai melalui program Keluarga Berencana (KB), yang berfokus pada pengaturan jarak kelahiran anak, pematangan usia saat melangsungkan pernikahan, serta penguatan kualitas kesehatan reproduksi. Keberhasilan jangka panjang dari program pemerintah ini pada dasarnya sangat bergantung pada bagaimana peran aktif dan keterlibatan masyarakat itu sendiri. Partisipasi tersebut tidak hanya sebatas pada kemauan warga untuk menerima edukasi dan memahami dampak positif KB, melainkan juga kenyamanan serta kesadaran penuh mereka dalam memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan dan menggunakan alat kontrasepsi secara konsisten.[17]

Studi yang dilakukan Farina Gul mengungkapkan bahwa penggabungan layanan Keluarga Berencana dengan pelayanan kesehatan reproduksi lainnya

---

[16] Maulida Rahmawati Emha dan Liza Novitasari Wijaya, *Kesehatan Reproduksi: Efek Program Keluarga Berencana (Kb) Terhadap Wanita Usia Subur*, *Jurnal Kesehatan Madani Medika* 15, no. 1 (2024): 116–23.

[17] Mega Octamelia dan Yogho Prastyo, *Advokasi Dan Bimbingan Pra Nikah Tentang Kesehatan Reproduksi Bagi Calon Pengantin 2,* no. 1 (2022): 5–9.

sangat dipengaruhi oleh proses bimbingan serta konseling yang diberikan oleh tenaga medis. Penyuluhan yang berbasis pada pendekatan yang sistematis, berkesinambungan, dan terintegrasi terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan serta keikutsertaan masyarakat dalam menggunakan kontrasepsi.[18] Penemuan ini sejalan dengan penelitian saat ini yang menekankan kontribusi PLKB sebagai penyuluh kesehatan reproduksi dalam meningkatkan partisipasi warga Desa Tri Martani dalam program KB.

Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) merupakan representasi agen resmi yang dibentuk oleh pemerintah untuk bertindak sebagai ujung tombak dalam menyukseskan program Keluarga Berencana langsung di tengah masyarakat. Ruang lingkup tugas seorang PLKB meliputi pengelolaan administrasi, penggerakan partisipasi warga, hingga pengembangan strategi program di lapangan agar edukasi mengenai KB dapat diterima dengan baik. Secara prinsip, keberadaan petugas ini memiliki tujuan krusial untuk mengarahkan, memotivasi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perencanaan jumlah anak yang ideal dalam satu keluarga. Melalui upaya pendampingan yang konsisten tersebut, diharapkan program KB dapat berjalan secara optimal sehingga target pemerintah dalam mengendalikan laju pertumbuhan populasi penduduk dapat tercapai dengan sukses.[19]

---

[18] Farina Gul dkk, *The Process of Integrating Family Planning Services with Other Reproductive Health Services in Low and Middle-Income Countries : A Scoping Review* 25, no. 3 (2025): 2.

[19] Selly Nurlita Sari, Slamet Muchsin, dan Hirshi Anadza, *Strategi Dan Peran Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kecamatan Kasembon Dalam Pencapaian Kualitas Pelayanan Yang Lebih Baik, Respon Publik* 16, no. 8 (2022): 65.

Pelaksanaan tugas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) memiliki keterkaitan yang erat dengan kebijakan kependudukan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa pengendalian pertumbuhan penduduk, pembangunan keluarga, dan penyelenggaraan program Keluarga Berencana merupakan tanggung jawab pemerintah yang dilaksanakan melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Sebagai tindak lanjut dari amanat tersebut, BKKBN menerbitkan berbagai peraturan yang mengatur pendayagunaan dan tugas PLKB sebagai ujung tombak pelaksanaan program di lapangan. PLKB berperan dalam melaksanakan penyuluhan, pendampingan, advokasi, serta pembinaan kepada pasangan usia subur guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan reproduksi dan partisipasi dalam program KB. Dengan demikian, keberadaan PLKB merupakan implementasi nyata dari kebijakan kependudukan nasional dalam rangka mewujudkan keluarga berkualitas, mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.[20]

Sebuah keluarga dapat dikategorikan telah mencapai taraf hidup yang sejahtera apabila seluruh kebutuhan dasarnya dapat terpenuhi secara konsisten dan berkesinambungan. Pemenuhan kebutuhan ini tidak hanya terbatas pada aspek material atau kecukupan ekonomi semata, melainkan juga harus mencakup

[20] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080).

pemenuhan aspek spiritual keagamaan serta keharmonisan sosial, sehingga keluarga tersebut mampu menjalani kehidupan yang layak dan beradaptasi dengan baik di lingkungan tempat mereka tinggal. Mewujudkan kesejahteraan di dalam rumah tangga merupakan hal yang sangat mendasar dan krusial. Sebab, dari kondisi keluarga yang sejahtera inilah akan lahir generasi penerus yang berpendidikan tinggi, memiliki budi pekerti yang luhur, berakhlak mulia, serta tumbuh dalam kondisi fisik yang sehat. Selain itu, kesejahteraan juga mendorong terbentuknya kemandirian hidup serta tingginya kesadaran anggota keluarga terhadap kepatuhan hukum dan kelestarian lingkungan sekitar.

Nilai-nilai ideal mengenai pentingnya menjaga kesejahteraan dan masa depan generasi yang kuat ini juga sejalan dengan prinsip dasar yang terkandung dalam ajaran Al-Qur'an, khususnya sebagaimana yang diamanatkan dalam Surat An-Nisa ayat 9.

وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْۖ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ﴿٩﴾

Dan Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).[21]

Penggunaan KB pada dasarnya merupakan bentuk ikhtiar manusia dalam mengatur jarak kelahiran dan mewujudkan keluarga yang sejahtera. Akan tetapi, dalam ajaran Islam diyakini bahwa segala sesuatu, termasuk pemberian keturunan, tetap berada dalam kekuasaan dan ketentuan Allah Swt. Dengan demikian,

[21] "Kemenag RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya,Penyempurnaan(Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Qur'an, 2019)," n.d.

meskipun pasangan suami istri telah melakukan ikhtiar melalui penggunaan alat kontrasepsi, apabila Allah Swt. berkehendak memberikan keturunan, maka hal tersebut merupakan bagian dari takdir-Nya yang harus diterima dan disyukuri.

Relevansi penelitian ini terletak pada usaha untuk meninggikan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam memperhatikan kesehatan reproduksi. Penyuluhan yang efektif mengenai reproduksi dapat menjadi solusi untuk mengatasi tantangan demografi dan kesehatan di wilayah pedesaan. Penelitian ini memiliki urgensi karena temuan yang didapat dapat memberikan saran praktis bagi PLKB dalam meningkatkan strategi penyuluhan, yang pada gilirannya dapat membantu mengurangi angka kelahiran yang tinggi serta meningkatkan kualitas hidup keluarga di Desa Tri Martani. Selain itu, penelitian ini menjawab kekurangan pengetahuan mengenai model penyuluhan KB di Kalimantan Selatan, yang selama ini sering kali belum diteliti secara mendalam. Berdasarkan pernyataan di atas, maka penelitian ini mengusung judul skripsi **"PENINGKATAN PARTISIPASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB) MELALUI BIMBINGAN PENYULUHAN REPRODUKSI OLEH PLKB DESA TRI MARTANI KAB. TANAH BUMBU."**

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada penjelasan dalam latar belakang di atas, pokok permasalahan yang ditetapkan sebagai fokus penelitian ini dapat dirumuskan menjadi beberapa poin berikut:

1. Bagaimana strategi PLKB yang dilakukan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di desa Tri Martani dalam mengikuti program KB?

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat di desa Tri Martani dalam mengikuti program KB setelah menerima bimbingan penyuluhan reproduksi?

C. Tujuan Penelitian

Selaras dengan rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui:

1. Mengetahui Bagaimana strategi PLKB yang dilakukan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di desa Tri Martani dalam mengikuti program KB.
2. Mengetahui Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat di desa Tri Martani dalam mengikuti program KB setelah menerima penyuluhan.

D. Signifikansi Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini juga memiliki signifikansi dalam pengembangan bimbingan dan penyuluhan Islam, karena model penyuluhan KB yang diuji dapat dipadukan dengan nilai-nilai keislaman dalam memberikan pemahaman kesehatan reproduksi kepada masyarakat pedesaan. Pendekatan bimbingan penyuluhan Islam berperan penting dalam mengatasi stigma sosial, tanggung jawab keluarga, dan perlindungan keturunan. Dengan demikian, temuan penelitian ini dapat mendukung penguatan peran PLKB sebagai penyuluh yang tidak hanya berorientasi medis, tetapi juga mampu menyampaikan pesan kesehatan reproduksi secara religius dan kultural, khususnya dalam konteks masyarakat Kalimantan Selatan.

2. Secara Praktis

a. Bagi praktisi kesehatan seperti PLKB

Penelitian ini memberikan rekomendasi praktis agar dapat meningkatkan metode penyuluhan reproduksi, termasuk inovasi dalam penyuluhan digital atau keterlibatan komunitas.

b. Bagi PUS (Pasangan Usia Subur)

Melalui temuan dalam kajian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran PUS mengenai pentingnya kesehatan reproduksi dan manfaat program Keluarga Berencana (KB). Dengan adanya bimbingan penyuluhan reproduksi yang tepat, PUS diharapkan mampu mengambil keputusan secara sadar dan bertanggung jawab dalam memilih metode kontrasepsi, merencanakan kehamilan, serta menjaga kesehatan ibu dan anak demi terwujudnya keluarga yang sehat dan sejahtera.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil kajian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi ilmiah dan basis perbandingan bagi pihak lain yang memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai bimbingan penyuluhan reproduksi, partisipasi PUS, dan peran PLKB dalam program KB di wilayah pedesaan.

E. Definisi Istilah

1. Peningkatan Partisipasi

Partisipasi adalah penyampaian informasi (*information*) sebagai upaya memberikan pengetahuan awal kepada masyarakat, kemudian konsultasi

(*consultation*) yang memungkinkan masyarakat menyampaikan pendapat serta memperoleh umpan balik dengan peran sebagai pendengar aktif tanpa terlibat langsung dalam implementasi gagasan. Proses pengambilan keputusan bersama melibatkan peran aktif masyarakat dalam menyumbang ide, gagasan, serta pilihan yang ada untuk membuka peluang baru yang dibutuhkan. Selanjutnya, partisipasi ini diwujudkan melalui aksi nyata secara kolektif. Hal ini menandakan bahwa keterlibatan warga tidak berhenti saat keputusan diambil, melainkan terus berjalan dalam pelaksanaan program hingga pembentukan kerja sama yang erat selama kegiatan berlangsung. Selain itu, partisipasi juga dapat berupa pemberian dukungan (*supporting independent community interest*), yaitu ketika kelompok-kelompok lokal memberikan kontribusi dalam bentuk dana, saran, maupun dukungan lainnya guna mengembangkan agenda dan kegiatan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat.[22] Dalam mengenali isu dan potensi yang ada, memilih dan mengambil keputusan mengenai alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan, melaksanakan upaya penyelesaian, serta keterlibatan masyarakat dalam berbagai proses.[23]

Peningkatan partisipasi dalam penelitian ini adalah tingginya 3 keterlibatan masyarakat di setiap tahap. Tahapan tersebut memiliki beberapa aspek yang mencakup penyampaian informasi, konsultasi, pengambilan keputusan secara bersama, pelaksanaan tindakan secara kolektif, serta memberikan dukungan

[22] Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Cetakan ke 4 (Alfabeta, 2017), 81.

[23] Misna, Jumaidi, dan Agus Surya Dharma, *Partisipasi Masyarakat Dalam Penggunaan Alat Kontrasepsi Di Kelurahan Rantau Kujang Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan, Jurnal Pelayanan Publik* 1, no. 2 (2024): 349–350.

terhadap kepentingan masyarakat. Peningkatan partisipasi dalam Program Keluarga Berencana (KB) melalui bimbingan penyuluhan reproduksi oleh PLKB Desa Tri Martani terlihat dari peningkatan pemahaman masyarakat mengenai informasi KB, kemauan untuk menyampaikan pendapat, partisipasi dalam pengambilan keputusan, keterlibatan dalam pelaksanaan kegiatan, serta dukungan masyarakat untuk mencapai keberhasilan program KB.

2. Program KB

Program KB adalah suatu inisiatif yang mendukung individu atau pasangan menikah untuk mencegah kehamilan yang tidak direncanakan serta mengatur interval dan jumlah kehamilan dengan memanfaatkan metode kontrasepsi yang sesuai.[24] Secara global, program KB adalah bagian dari upaya besar untuk memperbaiki kesehatan reproduksi dan kesejahteraan masyarakat. Program internasional KB fokus pada beberapa aspek, termasuk penyediaan kontrasepsi yang aman dan terjangkau, edukasi tentang kesehatan seksual dan reproduksi, serta pemberdayaan perempuan.[25]

Dalam penelitian ini, program Keluarga Berencana (KB) didefinisikan sebagai upaya memberikan dukungan kepada pasangan suami-istri untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan serta mengatur interval dan jumlah kelahiran dengan memanfaatkan metode kontrasepsi yang tepat. Program KB dalam studi ini meliputi tiga komponen, yaitu, pengaturan reproduksi, yang terkait dengan

---

[24] Hanafi Hartanto, *Keluarga Berencana Dan Kontrasepsi*, *Jakarta: Pustaka Sinar Harapan*, vol. 37 (Jakarta: Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,2004) 245.

[25] Arantika Meidya Pratiwi dkk., *Kesehatan Reproduksi Dan Keluarga* (Jawa Tengah: CV Eureka Media Aksara, 2025).35

pengendalian jumlah dan jarak kelahiran, pelayanan kontrasepsi, yang mencakup ketersediaan, aksesibilitas, dan penggunaan metode kontrasepsi yang aman dan tepat, dan edukasi dan pemberdayaan, yaitu penyuluhan mengenai kesehatan reproduksi untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi.

3. Bimbingan Penyuluhan Reproduksi

Bimbingan penyuluhan reproduksi adalah serangkaian proses belajar dan komunikasi yang sistematis dan terus-menerus untuk mengubah pengetahuan, sikap, dan tingkah laku individu atau kelompok agar bersedia dan mampu menjaga serta memperbaiki tingkat kesejahteraannya.[26] Upaya pemberian edukasi, informasi, dan pendampingan secara terarah kepada individu atau kelompok mengenai kesehatan reproduksi dan ruang lingkupnya, yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, serta kesiapan individu dalam menjalani kehidupan yang sehat, khususnya dalam konteks kehidupan berkeluarga dan reproduksi. Kegiatan ini dilakukan melalui metode edukatif seperti ceramah dan tanya jawab dengan materi yang mencakup konsep kesehatan reproduksi, KB, kehamilan, persalinan, nifas, menyusui, infertilitas, serta penyakit menular seksual.

Bimbingan penyuluhan merupakan suatu proses pemberian bantuan kepada individu maupun masyarakat melalui arahan, bimbingan, dan pendampingan guna membantu mereka memahami serta menghadapi berbagai permasalahan kehidupan. Dalam pelaksanaannya, penyuluh tidak bertindak memaksa masyarakat untuk mengikuti apa yang disampaikan, melainkan memberikan pemahaman dan arahan

[26] Notoatmodjo, *Promosi Kesehatan Dan Perilaku Kesehatan (Edisi Revisi 2012)*, *Penerbit: Rineka Cipta*, Edisi revi (Jakarta: Rineka Cipta : Jakarta., 2012, 2012). 250

sesuai kebutuhan individu. Hal ini sejalan dengan pendapat Akbar (2015), yang menyatakan bahwa bimbingan Islami adalah proses pemberian bantuan dari pembimbing kepada individu dengan cara memberikan arahan dan bantuan tanpa adanya unsur paksaan.[27]

Dalam penelitian ini, bimbingan penyuluhan reproduksi diartikan sebagai upaya memberikan pendidikan dan dukungan secara terarah serta berkelanjutan dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan, sikap, dan tindakan individu atau kelompok dalam menjaga kesehatan reproduksi dan merencanakan keluarga. Bimbingan penyuluhan reproduksi yang dibahas dalam penelitian ini mencakup tiga aspek, yaitu, edukasi kesehatan reproduksi (materi tentang kontrasepsi dan kesehatan reproduksi), metode dan proses komunikasi penyuluhan (presentasi dan sesi tanya jawab), serta perubahan sikap dan kesiapan perilaku sehat berkeluarga.

4. PLKB

Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) diartikan sebagai sosok fasilitator sekaligus penyuluh yang bergerak langsung di tengah-tengah komunitas warga. Peran utama mereka adalah memberikan pelayanan yang optimal, menyebarluaskan edukasi, serta memberikan pendampingan secara konsisten kepada masyarakat mengenai pentingnya program Keluarga Berencana, menjaga kesehatan reproduksi, hingga upaya-upaya dalam membangun ketahanan keluarga yang berkualitas. Lebih dari itu, keberadaan PLKB ini memegang andil yang sangat krusial karena mereka bertindak sebagai jembatan komunikasi resmi yang

[27] Nadzmi Akbar, *Bimbingan Dan Konseling Islami Dan Problem Mayarakat, Al-Hiwar Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah* 3, no. 1 (2015): 49.

menghubungkan secara langsung antara seluruh program dan kebijakan dari BKKBN dengan kebutuhan nyata masyarakat di lapangan.[28]

Di dalam penelitian ini, Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) didefinisikan sebagai aparat atau figur yang mengemban tanggung jawab untuk mengimplementasikan dan menggerakkan program KB di wilayah pedesaan maupun kelurahan melalui penyediaan layanan, edukasi, serta pendampingan langsung kepada warga. Penelitian ini melihat PLKB sebagai pelaku kebijakan dan agen yang memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan program kependudukan dan pengembangan keluarga. PLKB dalam kajian ini mencakup tiga peran, yaitu peran operasional dalam pelaksanaan program KB (penyuluhan, pendataan, pembinaan peserta KB), aspek fasilitasi dan komunikasi dengan masyarakat (fasilitasi, komunikasi, sosialisasi, motivasi, partisipasi), serta koordinasi dan pendampingan kepada keluarga untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan kesejahteraan keluarga.

F. Penelitian Terdahulu

Guna mendukung keabsahan kajian ini, penulis menggunakan sejumlah karya ilmiah terdahulu sebagai landasan komparasi. Keberadaan literatur tersebut berfungsi sebagai basis rujukan utama untuk memperkuat analisis mengenai Peningkatan Partisipasi Keluarga Berencana (KB) Melalui Penyuluhan Reproduksi Oleh PLKB Desa Tri Martani Kab. Tanah Bumbu, diantaranya sebagai berikut

[28] Nisa Ayu Amalia, Mumu, dan Bayu Adi Laksono, *Peran Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Program Kampung KB," Cendekia: Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat* 2, no. 2 (2024): 107.

1. Siti Maysaroh, Mahasiswa *"Strategi Bimbingan Penyuluh Keluarga Berencana Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Muslim Di Desa Padang Pengrapat Tanah Grogot".* 2023

a. Persamaan

Penelitian Siti Maysaroh (2023) memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama mengkaji pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) melalui pendekatan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat. Kedua penelitian juga menempatkan penyuluh KB sebagai aktor utama dalam memberikan pemahaman dan pendampingan kepada keluarga di tingkat desa, sehingga memiliki kesamaan konteks sosial dan pendekatan metodologis dalam pelaksanaan program KB.

b. Perbedaan

Perbedaan antara penelitian Siti Maysaroh dengan penelitian penulis terletak pada fokus tujuan penelitian. Penelitian Siti Maysaroh menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan keluarga Muslim sebagai dampak dari strategi bimbingan penyuluh KB, sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam Program KB melalui bimbingan penyuluhan reproduksi oleh PLKB di Desa Tri Martani Kabupaten Tanah Bumbu.

2. Skripsi Fitriyani, *"Strategi Penyuluhan Keluarga Berencana oleh Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di Kelurahan Murung Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan".* 2020

a. Persamaan

Penelitian Fitriyani (2020) memiliki persamaan dengan penelitian penulis pada subjek penelitian, yaitu Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB). Selain itu, kedua penelitian sama-sama membahas peran dan upaya PLKB dalam melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan Program Keluarga Berencana di tingkat desa atau kelurahan.

b. Perbedaan

Perbedaan kedua penelitian terletak pada fokus kajian yang diteliti. Penelitian Fitriyani menekankan pada strategi penyuluhan KB secara umum yang dilakukan oleh PLKB, sedangkan penelitian penulis secara khusus menitikberatkan pada bimbingan penyuluhan reproduksi sebagai sarana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengikuti Program KB di Desa Tri Martani Kabupaten Tanah Bumbu.

3. Skripsi Nana Anggraini, *"Peran Penyuluh Agama dan Penyuluh Keluarga Berencana Dalam Pencapaian Program KB Di Desa Kiram Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar"*. 2020

a. Persamaan

Menunjukkan adanya titik temu atau kesamaan substantif dengan kajian yang sedang penulis lakukan, terutama dalam hal menitikberatkan fokus pada signifikansi peran petugas penyuluh lapangan guna mendukung keberhasilan Program Keluarga Berencana. Kedua penelitian ini secara paralel mengupas bagaimana kontribusi nyata serta strategi yang diterapkan oleh para penyuluh KB dalam mengedukasi warga. Hal tersebut dilakukan demi meningkatkan pemahaman, kesadaran, serta partisipasi aktif masyarakat secara berkelanjutan

terhadap implementasi program-program KB, khususnya di wilayah pedesaan yang sering kali menghadapi keterbatasan akses informasi.

b. Perbedaan

Meskipun memiliki kemiripan, perbedaan mendasar antara kajian yang dilakukan oleh Nana Anggraini dengan penelitian penulis terletak pada batasan ruang lingkup serta spesifikasi peran dari figur penyuluh yang diteliti. Dalam studinya, Nana Anggraini lebih menitikberatkan perhatian pada pola hubungan kerja sama atau peran kolaboratif yang terjalin antara penyuluh agama dan penyuluh KB dalam menyukseskan program Keluarga Berencana. Sebaliknya, penelitian yang penulis lakukan ini mengabaikan unsur kolaborasi lintas sektor tersebut dan memilih untuk fokus secara mandiri pada efektivitas kinerja PLKB. Penulis ingin melihat bagaimana PLKB secara tunggal mengoptimalkan partisipasi masyarakat melalui pendekatan bimbingan serta penyuluhan kesehatan reproduksi yang berlokasi spesifik di Desa Tri Martani, Kabupaten Tanah Bumbu.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan serta memberikan alur yang sistematis, peneliti menyusun kerangka penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN, Bab ini menyajikan kerangka dasar atau gambaran umum mengenai topik yang dikaji dalam penelitian. Ruang lingkup pembahasan dalam bagian ini meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan pelaksanaan penelitian, kontribusi atau signifikansi penelitian, definisi

operasional variabel, tinjauan terhadap beberapa penelitian terdahulu, serta ditutup dengan sistematika penulisan laporan.

BAB II: KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR, bab ini memaparkan teori teori yang relevan dengan objek penelitian. Didalamnya mencakup pengertian partisipasi masyarakat, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi, definisi program KB, tujuan program KB, definisi bimbingan penyuluhan reproduksi, serta bimbingan penyuluhan reproduksi (pembimbing, terbimbing, materi, metode, media).

BAB III: METODE PENELITIAN, Bab ini menguraikan secara rinci metodologi yang diterapkan dalam penelitian. Pembahasan di dalamnya mencakup beberapa komponen esensial, mulai dari jenis dan pendekatan yang digunakan, subjek serta objek kajian, penentuan lokasi penelitian, hingga rincian mengenai jenis data dan sumber data, memaparkan teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data, metode analisis data yang diterapkan, serta prosedur pengecekan keabsahan data guna menjamin validitas hasil penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, menyajikan paparan komprehensif mengenai temuan yang diperoleh dari lapangan beserta analisis mendalamnya. Seluruh data yang disajikan dalam bagian ini merupakan hasil dari proses pengumpulan data yang objektif melalui kegiatan observasi langsung, wawancara mendalam dengan para informan, serta studi dokumentasi yang relevan dengan rumusan masalah penelitian.

BAB V: PENUTUP, memuat dua komponen utama, yaitu kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian, serta saran yang ditujukan sebagai kontribusi pemikiran bagi pembaca maupun instansi terkait.